

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Girimulyo)

Nomor : 3 Tahun 2023

LURAH GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIMULYO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI

CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH WINTAOS)

KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf, dalam rangka pengangkatan pamong Kalurahan Girimulyo perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon pamong Kalurahan (Dukuh Wintaos) Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023; |
| Mengingat |  |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27); |
|  |  |  | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 ; |
|  |  |  | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 ; |
|  |  |  | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 12); |
|  |  |  | Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 2). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : | TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH WINTAOS) KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang di maksud dengan;

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di Kalurahan Girimulyo yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan. |
|  | Kalurahan adalah Kalurahan Girimulyo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
|  | Penjaringan Dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan. |
|  | Lurah adalah Lurah Girimulyo yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelengarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. |
|  | Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. |
|  | Carik adalah Carik Girimulyo yang merupakan pemimpin sekretariat Kalurahan. |
|  | Kepala Urusan adalah Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta, dan Kaur Pangripta yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya. |
|  | Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan. |
|  | Dukuh adalah Dukuh Wintaos yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. |
|  | Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis. |
|  | Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Girimulyo, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. |
|  | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan Girimulyo yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan Dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan. |
|  | Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Girimulyo yang bersifat menetapkan. |
|  | Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Girimulyo yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Wintaos Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. |
|  | Calon Pamong adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah GIRIMULYO melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi Pamong Kalurahan GIRIMULYO. |
|  | Kapanewon adalah Kapanewon Panggang. |
|  | Panewu adalah pemimpin Kapanewon. |
|  | Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom. |
|  | Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. |
|  | Bupati adalah Bupati Gunungkidul. |

BAB II

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI

Bagian Kesatu

Panitia pelaksana

Pasal 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Dukuh WINTAOS, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji. | |
| (2) | Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. | |
| (3) | Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang. | |
| (4) | Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. | |
| (5) | Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : | |
|  | a. | 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota ; |
|  | b. | 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan |
|  | c. | 5 (lima) orang sebagai anggota. |
| (6) | Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: | |
|  | a. | menyusun jadwal kegiatan; |
|  | b. | menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Wintaos; |
|  | c. | melakukan penjaringan bakal calon; |
|  | d. | menerima berkas pendaftaran; |
|  | e. | melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon; |
|  | f. | membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon; |
|  | g. | menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi; |
|  | h. | mempersiapkan kebutuhan dalam penjaraingan dan penyaraingan calon; dan |
|  | i. | melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah. |
| (7) | Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah. | |
| (8) | Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab. | |

Pasal 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Panitia Pelaksana diberhentikan apabila : | |
|  | a. | Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6); |
|  | b. | Mendaftar sebagai calon Dukuh Wintaos di Kalurahan Girimulyo; atau |
|  | c. | Berhalangan tetap. |
| (2) | Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan. | |
| (3) | Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. | |

Bagian Kedua

Tim Penguji

Pasal 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: | |
|  | a. | unsur Pamong Kalurahan Girimulyo; |
|  | b. | tokoh masyarakat Kalurahan ; dan |
|  | c. | Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. |
| (2) | Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut: | |
|  | a. | 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota; |
|  | b. | 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan |
|  | c. | 3 Anggota. |
| (3) | Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. | |

Pasal 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tim Penguji bertugas : | |
|  | a. | menyusun tata tertib pelaksanaan ujian; |
|  | b. | mempersiapkan soal ujian; |
|  | c. | menentukan kriteria penilaian; |
|  | d. | menyelenggarakan ujian; |
|  | e. | menetapkan hasil ujian; |
|  | f. | membuat berita acara pelaksanaan ujian; |
|  | g. | menjaga kerahasiaan soal ujian; |
|  | h. | Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan |
|  | i. | melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah |
| (2) | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah. | |
| (3) | Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab. | |

Pasal 6

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian. |
| (2) | Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar. |

Pasal 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tim Penguji diberhentikan apabila : | |
|  | a. | Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; |
|  | b. | Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau |
|  | c. | Berhalangan tetap. |
| (2) | Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan. | |
| (3) | Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. | |

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tata Tertib penjaringan dan penyaringan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (6) huruf b paling sedikit memuat : | |
|  | a. | ketentuan umum; |
|  | b. | tata tertib pendaftaran; |
|  | c. | tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan |
|  | d. | tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian; |
| (2) | Tata Tertib Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah. | |

BAB III

TATA TERTIB PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 9

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Lurah mulai melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Wintaos sebelum Dukuh Wintaos memasuki purna tugas. |
| (2) | Hasil penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Wintaos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang calon di lowongan jabatan Pamong Kalurahan. |

Bagian Kedua

Penjaringan dan Penyaringan Calon

Dukuh WINTAOS

Pasal 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan. | | |
| (2) | Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: | | |
|  | a. | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; | |
|  | b. | memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; | |
|  | c. | berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; | |
|  | d. | berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; | |
|  | e. | sehat jasmani dan rohani; | |
|  | f. | berkelakuan baik; | |
|  | g. | belum pernah diberhentikan dari: | |
|  |  | 1. | jabatan Lurah; |
|  |  | 2. | jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau |
|  |  | 3. | jabatan negeri. |
|  | h. | bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Girimulyo; | |
|  | i. | memenuhi kelengkapan administrasi. | |
| (3) | Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji. | | |

Pasal 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Dalam hal pengangkatan Dukuh WINTAOS, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan : | |
|  | a. | bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan WINTAOS; dan |
|  | b. | mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan WINTAOS paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang. |
| (2) | Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan. | |
| (3) | Penduduk padukuhan WINTAOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh. | |
| (4) | Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian. | |

Pasal 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri dari : | | | |
|  | a. | surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup; | | |
|  | b. | surat pernyataan bermeterai cukup (Rp.10.000) yang berisi : | | |
|  |  | 1. | | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; |
|  |  | 2. | | memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; |
|  |  | 3. | | belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan |
|  |  | 4. | | Bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan WINTAOS. |
|  | c. | fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; | | |
|  | d. | fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik; | | |
|  | e. | surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; | | |
|  | f. | surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah; | | |
|  | g. | surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian; | | |
|  | h. | daftar riwayat hidup; | | |
|  | i. | pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar; | | |
|  | j. | surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan. | | |
|  | k. | surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan | | |
|  | l. | surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan. | | |
|  | m. | surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan. | | |
| (2) | Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir. | | | |
| (3) | Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi : | | | |
|  | a. | Lurah; | | |
|  | b. | Badan Permusyawaratan Kalurahan; | | |
|  | c.  d. | Pamong Kalurahan, dan  Staf Pamong Kalurahan; | | |
| (4) | Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu | | | |
|  | a. | | 1 (satu) eksemplar Asli; dan | |
|  | b. | | 1 (satu) eksemplar Focotopy. | |
| (5) | Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir. | | | |

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Pendaftaran

Pasal 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Dalam rangka penjaringan calon Dukuh WINTAOS, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh WINTAOS melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain. | |
| (2) | Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : | |
|  | a. | persyaratan; |
|  | b. | ketentuan pendaftaran; dan |
|  | c. | tempat dan waktu pendaftaran. |

Pasal 14

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Pendaftaran calon Dukuh WINTAOS dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja. |
| (2) | Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup. |
| (3) | Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang mendaftar lowongan calon Pamong Kalurahan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah. |
| (4) | Berdasarkan Laporan Tertulis dari Panitia Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan keputusan Lurah tentang pembatalan proses penjaringan dan Penyaringan. |
|  |

Pasal 15

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Pengambilan berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Dukuh WINTAOS. |
| (2) | Dalam hal pengambilan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Dukuh WINTAOS, maka pengambilan berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon . |
| (3) | Pendaftaran bakal calon Dukuh WINTAOS dilakukan di sekretariat panitia pengisian Pamong Kalurahan. |
| (4) | Pengembalian berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Dukuh WINTAOS. |
| (5) | Dalam hal pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Dukuh WINTAOS, maka pengembalian berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon dengan surat kuasa bermaterai 10.000. |
| (5) | Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilayani dari jam 08.00 sampai 15.30 WIB. |
| (6) | Pendaftaran hari terakhir dilayani dari jam 08.00 sampai 16.30 WIB. |
| (7) | Berkas pendaftaran calon Dukuh WINTAOS dimasukkan map berwarna biru. |

Pasal 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan. | |
| (2) | Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : | |
|  | a. | 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan; dan |
|  | b. | 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana. |

BAB IV

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 17

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah. |
| (2) | Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian. |
| (3) | Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. |
| (4) | Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh WINTAOS ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran. |
| (5) | Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Dukuh WINTAOS dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan. |
| (6) | Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan anggota Panitia. |
| (7) | Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Dukuh WINTAOS yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah. |
| (8) | Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pamong Kalurahan yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah. |
| (9) | Dalam hal calon Dukuh WINTAOS yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun. |
| (10) | Dalam hal calon Dukuh WINTAOS yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan. |

Pasal 18

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Dalam hal terdapat bakal calon Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi. |
| (2) | Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah. |
| (3) | Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan. |

Pasal 19

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (3) Pamong yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Lurah mengangkat Pamong lain sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas. |
| (2) | Dalam hal Dukuh WINTAOS purna tugas sebelum tahapan penjaringan dan penyaringan selesai dilaksanakan, maka Dukuh WINTAOS dimaksud diberhentikan dan selanjutnya Lurah mengangkat pamong lain sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas. |

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN,KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Pamong Kalurahan. | |
| (2) | Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: | |
|  | a. | ujian tulis; dan |
|  | b. | ujian praktek. |
| (3) | Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang: | |
|  | a. | Pemerintahan; |
|  | b. | Pembangunan; |
|  | c. | Pemberdayaan masyarakat; |
|  | d. | Pembinaan kemasyarakatan; |
|  | e. | Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan |
|  | f. | Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan. |
| (4) | Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek mengoprasionalkan komputer. | |
| (5) | Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode Computer Based Test (CBT). | |
| (6) | Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode Computer Based Test (CBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. | |
| (7) | Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek di laksanakan di Balai Kalurahan. | |
| (8) | Pelaksanaan Ujian tulis dan ujian praktek akan dilaksanakan di Balai Kalurahan GIRIMULYO. | |
| (9) | Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan dibalai Kalurahan GIRIMULYO Tim Penguji dapat menentukan tempat ujian praktek lainnya yang lebih layak. | |
|  |  | |

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Penilaian Calon Dukuh dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut: | |
|  | a. | bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan |
|  | b. | bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari niai total. |
|  | c. | bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya. |
| (2) | Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: | |
|  | **Nt = (50% X UT) + (45% X UP) + (5% X PK)** | |
|  | Keterangan : | |
|  | Nt = Nilai total | |
|  | UT = Nilai ujian tertulis | |
|  | UP = Nilai ujian praktek | |
|  | PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan. | |
| (3) | Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun. | |

Bagian Ketiga

Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 22

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan. |
| (2) | Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari. |
| (3) | Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di Lokasi Ujian. |
| (4) | Dalam hal lokasi ujian tertulis dan praktek berbeda maka untuk merekap hasil ujian dilaksanakan di balai Kalurahan GIRIMULYO. |

Penetapan Hasil Ujian Pamong Kalurahan

Pasal 23

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Calon Dukuh WINTAOS yang dinyatakan lolos seleksi adalah 1 (satu) orang calon Dukuh WINTAOS yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi; |
| (2) | Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Dukuh WINTAOS yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang berupa ujian tertulis bagi calon Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama. |
| (3) | Ujian ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama. |

Pasal 24

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (1) | Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian. |
| (2) | Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji. |
| (3) | Dalam hal diadakan ujian ulang bagi calon Dukuh WINTAOS yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji |
| (4) | Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah. |

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 25

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Pengumuman hasil ujian calon Dukuh WINTAOS dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji. |
| (2) | Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman dan juga disampaikan kepada calon Dukuh WINTAOS yang mengikuti ujian. |

Pasal 26

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Dukuh WINTAOS dari tim penguji.

BAB VI

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI

PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 27

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Hasil Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu. |
| (2) | Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dan dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan Hasil Ujian dan berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan. |
| (3) | Berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi. |
| (4) | Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan. |
| (5) | Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan. |

BAB VII

PELANTIKAN DUKUH WINTAOS

DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 28

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Lurah menetapkan Dukuh WINTAOS yang diberi rekomendasi sebagai Dukuh WINTAOS dengan Keputusan Lurah. |
| (2) | Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik calon Dukuh WINTAOS yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan Keputusan Lurah. |

Pasal 29

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang. |
| (2) | Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan. |

Pasal 30

Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

Pasal 31

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Sebelum memangku jabatan Dukuh WINTAOS, wajib mengucapkan sumpah/janji. |
| (2) | Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Dukuh WINTAOS diselenggarakan di Kalurahan GIRIMULYO yang dihadiri unsur Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dapat dihadiri pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan. |
| (3) | Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sekurang-kurangnya meliputi :   1. Pembukaan; 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 3. Pembacaan Keputusan Lurah; 4. Pengambilan sumpah/janji; 5. Pelantikan; 6. Penyerahan Keputusan Lurah 7. penandatanganan berita acara serah terima jabatan 8. penyerahan memori serah terima jabatan; 9. Sambutan-sambutan; 10. Doa; 11. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan 12. Penutup |
| (4) | Dalam hal Pamong Kalurahan lama dijabat oleh Pelaksana Tugas, maka serah terima jabatan Pamong Kalurahan dilakukan antara Pelaksana Tugas dengan Pamong Kalurahan terlantik. |

Pasal 32

Pakaian yang dikenakan calon Pamong Kalurahan terlantik pada saat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah pakaian dinas harian warna khaki.

Pasal 33

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Lurah melaporkan hasil pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan. |
| (2) | Laporan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :   1. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan; 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Pamong Kalurahan; dan 3. Berita acara serah terima jabatan. |

BAB VIII

BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI DAN PELANTIKAN CALON DUKUH WINTAOS

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan calon Dukuh WINTAOS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan GIRIMULYO Tahun Anggaran 2023.

BAB IX

JADWAL KEGIATAN

Pasal 35

Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Pamong Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lurah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di GIRIMULYO  Pada tanggal 3 April 2023  LURAH GIRIMULYO,  **SUNU RAHARJO** |
| Diundangkan di GIRIMULYO  Pada tanggal 3 April 2023  CARIK GIRIMULYO,  **P A R Y A N I** |  |

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 3

**LAMPIRAN**

**BERITA KALURAHAN GIRIMULYO**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI**

**CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH WINTAOS)**

**KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN 2023**

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAHAPAN** | **TANPA PERPANJANGAN** | **DENGAN PERPANJANGAN I** | **DENGAN PERPANJANGAN II** |
|  | 1. **TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGUMUMAN** |  |  |  |
| 1 | Pembentukan Panitia Penjaringan | 20 Maret 2023 |  |  |
| 2 | Penyusunan Program kerja, Tata Tertib Pengisian Pamong. | 26 Maret-5 April 2023 |  |  |
| 3 | Sosialisasi dan Pengumuman | 6 -14 April 2023 |  |  |
|  | 1. **TAHAP PENDAFTARAN** |  |  |  |
| 3 | Masa Pendaftaran | 8-16 April 2023 |  |  |
| 4 | Masa Perpanjangan Pendaftaran |  | 17 Mei – 7 Juni 2023 |  |
|  | 1. **TAHAP PENELITIAN ADMINISTRASI** |  |  |  |
| 7 | Penelitian administrasi pelamar | 17-22 Mei 2023 |  |  |
| 8 | Perpanjangan waktu pendaftaran |  | 8-12 Juni 2023 | 23-31 Mei 2023 |
| 9 | Penelitian administrasi pelamar (Perpanjangan II) |  |  | 1-5 Juni 2023 |
| 10 | Laporan Panitia ke Lurah | 23 Mei 2023 | 13 Juni 2023 | 6 Juni 2023 |
| 11 | Penerbitan SK Lurah tentang Pembatalan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan | 24 Mei 2023 | 14 Juni 2023 | 1. Juni 2023 |
|  | 1. **TAHAP SELEKSI/UJIAN DAN PENGUMUMAN** |  |  |  |
| 12 | Penetapan Tim Penguji oleh Lurah | 2 Juni 2023 | 15 Juni 2023 | 9 Juni 2023 |
| 13 | Pembekalan Tim Penguji | 5 Juni 2023 | 16 Juni 2023 | 12 Juni 2023 |
| 14 | Pembekalan Peserta Ujian | 6 Juni 2023 | 19 Juni 2023 | 13 Juni 2023 |
| 15 | * **Karantina Tim Penguji** | 9-10 juni 2023 | 23-24 Juni 2023 | 16-17 Juni 2023 |
|  | * **Pelaksanaan ujian (tertulis dan praktek)** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | * **Pelaksanaan ujian ulang (bila perlu)** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | * **Koreksi hasil ujian (ujian I dan ulang)** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | * **Pengumuman hasil akhir ujian** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | * **Laporan hasil ujian kepada Lurah** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | * **Penetapan hasil ujian oleh Lurah** | 10 Juni 2023 | 24 Juni 2023 | 17 Juni 2023 |
|  | 1. **PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN** |  |  |  |
| 16 | Konsultasi kepada Panewu | 12 Juni 2023 | 26 Juni 2023 | 19 Juni 2023 |
| 17 | Penerbitan rekomendasi Panewu (menolak/menyetujui) | 21 Juni 2023 | 6 Juli 2023 | 28 Juni 2023 |
| 18 | Penerbitan SK Lurah ttg Pengangkatan Pamong Kalurahan | 23 Juni 2023 | 7/10 Juli 2023 | 30 Juni/6 Juli 2023 |
|  | 1. **PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN** |  |  |  |
| 19 | Pelaksanaan pelantikan Pamong Kalurahan lulus ujian | 26 Juni 2023 | 10 Juli 2023 | 3 Juli 2023 |
|  | 1. **LAPORAN HASIL PENJARINGAN** |  |  |  |
| 20 | Laporan hasil penjaringan ke Bupati melalui Panewu | 3 Juli 2023 | 20 Juli 2023 | 12 Juli 2023 |

GIRIMULYO, 3 April 2023

LURAH GIRIMULYO

**SUNU RAHARJO**